



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KISDIYANTO**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara**

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD.**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

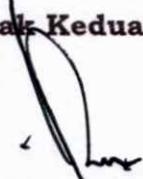
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,


MOH. MAHFUD MD

Pihak Pertama,


KISDIYANTO

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN**

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional	90%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.	80%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	75
	2. Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputi	90
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4

Jumlah Anggaran:

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Rp 11.202.880.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2024

**Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

MOH. MAHFUD MD

**Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara,**

KISDIYANTO

**DOKUMEN MANUAL INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2024**

Sasaran Strategis 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif
Indikator Kinerja 1	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Pertahanan Negara pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
Definisi	<p>Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pertahanan negara adalah rata-rata persentase capaian MEF dan persentase capaian Industri Pertahanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential Force/MEF) <p>Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential Force/MEF) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum, yang merupakan bagian dari postur TNI secara utuh, dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual serta tercapainya efek tangkal yang tinggi.</p> 2. Industri pertahanan <p>Industri pertahanan adalah sebagian dari tatanan industri nasional yang secara khusus memiliki kemampuan ataupun potensi yang dapat maupun dikembangkan untuk menghasilkan produk berupa sistem senjata, peralatan dan perlengkapan, dukungan administrasi/logistik ataupun jasa-jasa bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Permasalahan yang dihadapi diantaranya pada keterbatasan dalam penguasaan teknologi kunci dan/ atau kemampuan integrasi sistem. Dua hal tersebut, merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alutsista TNI sekaligus memiliki daya saing internasional guna menjadi bagian dari <i>global supply chain</i>.</p>
Sumber Data	Laporan Pencapaian MEF Kementerian Pertahanan dan Laporan Pencapaian Kontribusi Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan

Cara Menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Persentase Capaian MEF</i> $\Sigma = \frac{\text{Capaian MEF}}{\text{Target MEF pada Dokumen Perencanaan Nasional}} \times 100\%$ 2. <i>Persentase Capaian Industri Pertahanan</i> $\Sigma = \frac{\text{Capaian Industri Pertahanan}}{\text{Target Industri Pertahanan pada Dok Perencanaan Nasional}} \times 100\%$ 3. <i>Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Hanneg</i> $\Sigma = \frac{\text{Persentase Capaian MEF} + \text{Persentase Capaian Industri Pertahanan}}{2}$ <ul style="list-style-type: none"> ➤ Target Nasional MEF Tahun 2024 sebesar 100% ➤ Target Nasional Inhan Tahun 2024 sebesar $\geq 50\%$
Indikator Kinerja 2	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidkoor Hanneg yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional
Cara Menghitung	$\frac{\text{Realisasi Rekomendasi}}{\text{Target Rekomendasi}} \times 100\%$
Indikator Kinerja 3	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti
Definisi	Mengukur sejauh mana butir-butir rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Sumber Data	Rata-rata capaian butir-butir persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidkoor Hanneg yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait
Cara Menghitung	$\frac{\text{Butir - Butir Rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Butir - Butir Rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$
Sasaran Strategis 2	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal

Indikator Kinerja 1	Nilai SAKIP
Definisi	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah.</p> <p>Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (6%) • Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (9%) • Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%) 2. Pengukuran Kinerja <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6%) • Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9%) • Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%) 3. Pelaporan Kinerja <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3%) • Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya (4,5%) • Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,5%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%) • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7,5%) • Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (12,5%)

Sumber Data	Laporan Evaluasi SAKIP dari unit Inspektorat Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	<p>Predikat penilaian SAKIP ialah 0 sampai 100, dengan tujuh kriteria yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AA (>90-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30)
Indikator Kinerja 2	Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi Deputi
Definisi	<p>Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi adalah indeks untuk mengukur kualitas penganggaran, perencanaan dan tata laksana organisasi dalam satu tahun anggaran.</p> <p>Komponen penilaian mandiri penganggaran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan; 2. Keselarasan TOR & RAB; dan 3. Jumlah revisi. <p>Komponen penilaian mandiri perencanaan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu dokumen perencanaan; 2. Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan nasional; 3. Kualitas dokumen perencanaan; dan 4. Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan. <p>Komponen penilaian mandiri tata laksana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan; 2. Ketatalaksanaan; dan 3. Evaluasi jabatan.
Sumber Data	Hasil penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	<p>Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kemenko Polhukam.</p> <p>Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi tiga unsur penilaian yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> *30 poin untuk unsur penganggaran; *40 poin untuk unsur perencanaan. *30 poin untuk unsur tata laksana.
Indikator Kinerja 3	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi

Definisi	Indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputy adalah satuan hitung untuk mengukur tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara terhadap pelayanan Kesekretariatan.
Sumber Data	Hasil survei kepuasan pelayanan Sekretariat Deputy Bidkoor Hanneg dari <i>stakeholders</i>
Cara Menghitung	<p>Penilaian berdasarkan hasil survei Bagian Administrasi dengan menggunakan kategorisasi skala likert:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1,00-1,79 = Sangat tidak puas 2. 1,80-2,59 = Tidak puas 3. 2,60-3,39 = Cukup puas 4. 3,40-4,19 = Puas 5. 4,20-5,00 = Sangat puas <p>Adapun, indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputy dihasilkan dari perhitungan berikut:</p> <p>= Hasil Survei Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara</p>

Jakarta, Januari 2024

Deputi Bidang
Koordinasi Pertahanan
Negara,



Kisdlyanto